

CATATAN ETNOGRAFI 10

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur

PLASMA TANPA INTI, SEBUAH ANOMALI

Ella



“Kalau memang ingin membuka sawit disini, kami ingin hanya ada plasma saja, tanpa inti. Kebun plasma haruslah berasal dari gabungan kepemilikan tanah-tanah warga yang bernaung di Koperasi”-Pak A

Plasma tanpa inti. Begitu yang Mas Bay ceritakan kepada saya ketika kami berdiskusi tentang Muara Kaman dan Konsesi Sawit yang mengelilinginya. Saya tidak memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud dengan Plasma tanpa inti. Bukankah Kebun plasma adalah representatif dari kebun inti, atau dengan kata lain Plasma hadir sebagai pendukung Inti. Adalah BTMU (Bina tani Muara Kaman Ulu) koperasi yang dibentuk untuk mengelola kebun Plasma seluas 545 Ha, milik PT SKL (Sawit Kaltim Lestari). Kebun ini adalah gabungan dari tanah-tanah yang dimiliki oleh warga Muara Kaman yang dulunya beraktivitas tanam disana. Ada...orang yang mempunyai kaplingan-kaplingan di tanah tersebut dengan besaran hektar yang berbeda-beda. Seperti biasa, perusahaan sawit datang dikemudian hari dan ingin mengubah bentang alam lahan behuma yang semula menanam beragam jenis tanaman tersebut, menjadi satu jenis tanaman kecil itu saja. Seperti biasa juga, banyak janji-janji yang diobral untuk memuluskan niat ekspansif tersebut dan salah satunya adalah dengan membangun kebun plasma. Warga yang memang sudah bernaung dibawah koperasi tani, berstrategi dalam menghadapi perusahaan yang tentu saja membawa perizinan dan mandat pemerintahan daerah. *'Kalau memang ingin membuka sawit disini, kami ingin hanya ada plasma saja, tanpa inti. Kebun plasma haruslah berasal dari gabungan kepemilikan tanah-tanah warga yang bernaung di Koperasi'*. Alhasil jadilah kebun plasma seluas 545 Ha milik komunal tersebut. Pembagian hasil plasma juga didasarkan pada luasan tanah yang dimiliki, semisal Pak A memiliki 3 hektar tanah dari 545 Ha, maka rasio keuntungannya adalah 3: 545 Ha. Koperasi ini juga terkenal memiliki manajemen yang baik dan pembukuan keuangan yang tertata rapi. Bahkan untuk satu anggota yang punya lahan 1 Ha, baru-baru ini bagi hasil plasma mencapai 600 ribu rupiah. Sebuah angka yang menurutnya tidak akan pernah bisa dicapai oleh perusahaan sawit bagian Hilir (Memang tidak hanya ada satu perusahaan di sekitaran desa) yang kecendrungan bagi hasil plasma selalu berkurang dari bulan ke bulan baik karena utang masyarakat terhadap perusahaan yang belum kunjung lunas, atau karena minimnya profesionalitas pengelola koperasi plasma.

Muara Kaman berdasarkan data terbaru terdiri dari 20 Desa dengan keseluruhan luas mencapai 3.410 Km. Tempat ini (Desa Muara Kaman Ulu dan Ilir) memiliki latar belakang historis yang cukup kuat, seandainya dengan sedikit kemauan dari pihak-pihak pemegang kepentingan, desa ini mungkin amat bisa bertopang hidup dari sektor *historical tourism*. Bagaimana tidak, jejak kerajaan tertua Kutai Ing Martadipura -dengan rajanya yang terkenal mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para dewa- terletak di kampung pinggir sungai ini. Ketika saya belum sama sekali menginjak disini, saya sempatkan mengumpulkan banyak informasi melalui internet, dan beberapa tulisan yang saya temukan adalah tulisan 'catatan perjalanan' orang-orang yang pernah berkunjung kesini dengan tujuan 'menelusuri jejak kerajaan tertua di Indonesia'. Sayangnya, saya sudah dua kali ditolak masuk oleh penjaga museum Kutai Ing Martapura, dengan alasan kunci museum sedang dibawa oleh orang lain. Padahal waktu itu saya sudah sampaikan bahwa saya adalah seorang peneliti dari Kota Bogor yang ingin melihat duplikat prasasti Yupa dan kawan-kawannya, namun tetap saja penjaga pintu menyatakan bahwa ia tidak sedang memiliki kunci museum. Diluar kenyataan apakah penjaga museum itu sedang berkata benar atau tidak, Saat saya coba keluhkan kepada ibu semang saya perihal penolakan selama dua kali tersebut. Beliau berargumentasi bahwa persoalan utama dari penolakan tersebut kemungkinan besar adalah kekhawatiran akan munculnya rentetan kejadian magis. Menurut Ibu, salah satu artefak sejarah yakni batu lesung

memiliki kedahsyatan nilai magis dan menyaratkan perlakuan khusus – yakni ritual yang hanya boleh ditangani oleh orang-orang terpilih, seperti keturunan raja. Ibu bercerita bahwa beberapa tahun silam, ada sekelompok orang (ibu menyebutnya demikian) yang melakukan ritual memandikan batu lesung tanpa memanggil seseorang yang merupakan keturunan raja-bernama Pak Bahri. Waktu itu Pak Bahri yang diamini masyarakat sebagai keturunan Raja Kutai (Ibu tidak terlalu jelas merujuk kepada Kutai yang mana), sedang tidak ada di desa. Setelah ritual tanpa kehadiran tokoh kunci tersebut, terjadilah *barat* (Sebutan angin puting beliung dalam bahasa Kutai) yang hampir memporak-porandakan rumah seluruh warga kampung. Dijemputlah bapak Bahri tersebut dan diminta untuk melakukan ritual ulang, dan lantas barat berhenti seketika. Kejadian tersebut selalu diingat warga Muara Kaman dan selalu diungkit kepada setiap pendatang untuk tidak memperlakukan artefak sejarah secara serampangan. Hal ini sebenarnya menegaskan satu hal, bahwa masyarakat Muara Kaman memiliki penghargaan yang tinggi terhadap artefak dan situs. Penghargaan ini harusnya bisa dioptimalkan untuk mendorong tumbuh kembang sektor pariwisata sejarah sebagai penggerak roda perekonomian lokal. Kabar baik yang ingin saya sampaikan di catatan ke 10 ini adalah mengenai Festival Kampung Muara Kaman, yang akan dilaksanakan pada akhir bulan (29-30 Agustus 2016).¹

Wacana Kehistorisan Muara Kaman² sebagai situs penting dan pemicu pertumbuhan ekonomi berdasarkan kepariwisataan sejarah mungkin tidak pernah menemui realitasnya. Desa ini lebih memilih untuk menyandarkan diri seutuhnya kepada perkebunan monokultur, ya apalagi kalau bukan Ekonomi Sawit. Di Muara Kaman, beroperasi dua perusahaan yakni PT Prima Mitra Jaya dan PT Teguh Jaya Abadi – yang berada dalam satu holding yakni Evans Group. Pada 2014 warga melakukan protes atas hak-hak warga yang tidak terpenuhi, seperti pesangon bagi yang diPHK, perbaikan jalan rusak di sekitar Tebalai, serta isu penyerobotan lahan seluas 200 Ha di Desa Muara Kaman Ilir. PT PMM dan PT TJA digadang-gadang juga beroperasi tanpa HGU, hal ini yang mendorong kawan-kawan dari WALHI KALTIM dan POKJA 30 untuk melakukan uji akses ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Disnakertrans Provinsi terhadap aktivitas kedua anak perusahaan Evans Group ini. Ketika saya meminta dokumen uji akses kepada dua LSM tersebut diatas, mereka menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahapan persidangan, dan mereka dengan senang hati membantu saya untuk berdiskusi mengenai tumpang tindih perijinan perkebunan di Kecamatan Muara Kaman.

Selain kedua perusahaan yang konon tak berHGU ini, beroperasi juga PT SKL (Sawit Kaltim Lestari) yang merupakan holding dari Kencana Group di Muara Kaman Ulu. Disinilah terdapat perkebunan plasma tanpa inti, yang berada di bawah naungan Koperasi Bina Tani Muara Kaman Ulu. Koperasi ini memantik banyak scholar untuk datang dan menyelidiki fenomena yang terjadi. Menurut Mas Bayu sendiri, sejak 2013 kawan-kawan akademisi dari IPB sudah datang dan mengawal proses terbentuknya koperasi. Model keterlibatan masyarakat yang demikian ini mungkin tidak bisa mengurangi laju kerusakan ekologis akibat aktivitas perkebunan monokulturi, tapi model ini memastikan masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap prosesnya. Masyarakat bisa memantau seberapa besar bagi

¹ Akan disampaikan di catatan berikutnya.

² Saya menyebutnya Muara Kaman untuk menggabungkan keberadaan dua desa yang berdampingan yakni Muara Kaman Ulu dan Muara Kaman ilir.

hasil plasma yang memang seharusnya mereka terima. Jika dibandingkan dengan desa-desa sebelah, seperti Sedulang-Puan Cepak-Sabintulung, maka keuntungan plasma koperasi BTMU termasuk cukup besar dan stabil. Sabintulung misalnya, dari wawancara terakhir saya, bulan lalu bagi hasil plasma besarnya hanya 120 ribu per rumah tangga. Sedang Puan Cepak, terakhir kali saya datang kesana, satu koperasi (ada 3 koperasi plasma disana) memberikan 150 ribu rupiah.

Menurut Ibu Lia- salah seorang warga Muara Kaman, yang juga mantan Buruh Harian Lepas selama 6 tahun di PT PMM- kenapa pendapatan plasma di BTMU lebih besar dibandingkan dengan kebun-kebun plasma lainnya adalah karena Koperasi tidak memiliki banyak 'hutang' baik itu hutang karena iming-iming ganti rugi lahan³ maupun hutang akibat beban pembiayaan pembangunan kebun - masih ingat bagaimana Liang Buaya menerima bantuan 5 juta per KK yang ternyata adalah hutang- dan manajemen koperasi yang profesional (pembukuan keuangan yang transparan dan rapi).

'Kalau di PMM paling dapat 150, itu udah paling banyak. Terakhir aku dengar rapat sama anggota koperasi, katanya hutang masih sisa berapa miliar lagi. Mau sampe kapan bayar hutang, perasaan aku udah dari 2011 atau 2012 panen, masih juga bayar hutang sampe sekarang. Jadi kapan dapat yang full tanpa dipotong hutang. Kalau di BTMU itu - kebetulan aku punya tanah disana- alhamdulillah barusan dapat 600 ribu, padahal Cuma ndik tapi luas tanah ku. Kalau yang tanahnya banyak kadang bisa 2 juta per bulan, kalau di tempat lain, ndik ada kan yang bisa sebanyak itu untungnya'. Ibu Lia

Kabar Desa Hari Ini : Dilema Pemimpin Baru, Antara Got Limbah dan Upah Murah

September ini akan dilakukan pemilihan kepala Desa Liang Buaya, persisnya saya tidak terlalu tahu kapan, kemungkinan besar minggu ke-dua, begitu yang aku dengar dari Om Lim. Perkiraan saya tentu saja meleset, jika awalnya saya yakin bahwa beliau (Om Lim) yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka semuanya hanya tinggal asumsi. Ya benar, beliau pernah menyampaikan keinginan untuk menjadi petinggi desa kepada saya, tapi apa daya ketika melihat peta pendukung nya yang semakin hari menyusut- ikut pula menyusutkan niatnya untuk maju ke panggung kontestasi. *Track record* nya sebagai tokoh anti-sawit dan cenderung menolak berkompromi dengan pihak perusahaan, turut pula mereduksi peluangnya untuk beroleh simpati dari sesama koleganya di pemerintahan desa. Maka menyeretnya ke posisi legislatif adalah yang terbaik untuk saat ini, ya beliau diamanatkan melalui musyawarah oleh badan musyawarah desa untuk menjadi ketua BPD. Meski jabatan beliau hampir sejajar dengan posisi eksekutif seorang kepala desa, namun peran yang dimainkannya tidak lah se signifikan kepala desa, terutama dalam hal membangun komunikasi dengan pihak luar dan pengambilan keputusan.

Dimana-mana politik tetaplah berjudul 'intrik' dan 'kepentingan'. Siapa yang memiliki kepentingan di sana intrik digelontorkan. Pada proses penjaringan bakal calon kepala desa misalnya , panitia seharusnya menjaring sebanyak-banyaknya calon untuk diverifikasi. Bahkan berdasarkan rujukan peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa, ketika calon yang masuk pada proses pendaftaran hanya ada dua, maka panitia diharuskan

³ Merujuk kepada kejadian pembagian 5 juta rupiah per KK di Desa Liang Buaya , yang ternyata adalah hutang.

untuk memperpanjang jadwal pendaftaran (Tahap II). Namun yang terjadi di Desa Liang Buaya adalah sebuah ketergesa-gesaan yang bisa menjadi memiliki niat khusus. Hanya ada dua calon yang mendaftar, yakni : Piras dan Abdul. Ya otomatis, ketika hanya ada dua calon, penetapan calon pun mau tak mau meloloskan keduanya, karena tidak mungkin mengulang proses dari awal atau hanya menyisakan satu calon tunggal. Tidak ada sejarah aklamasi dalam kontestasi politik kontemporer, apalagi untuk sebuah jabatan yang strategis . Rupanya Semua ketergesa-gesaan tadi dimaksudkan untuk mencegah Om Lim maju berkontestasi , mereka mengira bahwa beliau sedang dalam proses pengumpulan syarat-syarat, padahal saat itu beliau sesungguhnya sedang membantu sepupunya yang juga ingin mencalonkan diri jadi Kepala Desa di Puan Cepak. Meski informasi ini saya hanya dengar dari Om Lim sendiri, tapi saya tidak merasa heran jika yang terjadi demikian. Disatu sisi beliau memang punya banyak ‘musuh’ di struktural desa- karena sikap keras kepala dan anti-kompromi terhadap perusahaan sawit yang hari ini resmi mengeskpansi desa, tetapi bakat kepemimpinan beliau masih sangat dibutuhkan untuk memastikan arah dan alur pemerintah desa. Orang-orang meski tidak menyukainya, masih menaruh rasa segan dan hormat yang tinggi pada prinsipnya tersebut. Bahkan komunitas banjar menaruh simpati yang luar biasa terhadap netralitas sikap Om Lim terhadap orang Banjar dalam langgam kehidupan sehari-hari. Ibu Lastri bahkan pernah menyampaikan kekecewannya ketika Om Lim kalah dalam kontestasi pilkades beberapa tahun silam *“Kalau disini kayaknya memang harus banyak saudara la kalau mau menang, berkualitas saja ndak cukup. Lihat Pak Lim, beliau bagus, ya tapi karena gak punya basis keluarga dekat yang mendukung, jadi ya gak menang”* . Lebih jauh menurut Om Lim, salah satu calon sangat tidak menginginkan dia maju dalam bursa pencalonan ‘menyetor’ sejumlah uang kepada panitera pemilihan. Tentu saja kalau hal ini benar, realitas politik kampung sudah menyerap nan menyerupai seutuhnya realitas politik di kota yang penuh praktik-praktik kecurangan. Sebuah kabar yang sangat tidak baik tentu saja.

Pemerintah desa mempunyai andil yang besar dalam mempermudah proses masuknya pelbagai aktivitas ekonomi kapital dari luar ke dalam kampung. Mereka menjadi pihak yang pertama kali harus ditaklukan ketika cukong-cukong ingin mendapatkan perizinan usaha, hal ini juga dalam rangka mengantisipasi gejolak masyarakat yang kemungkinan muncul selama proses penetrasi modal berlangsung. Di Liang Buaya, resistensi yang pernah muncul ketika tahun 2011 pun dikomandoi oleh mereka yang saat itu sedang berkuasa dan tentu saja didukung oleh warga setempat, bisa dibilang bahwa perlawanan saat itu menggenggam legitimasi politik yang utuh nan tak terbagi. Tapi hari ini legitimasi politik yang utuh nan tak terbagi itu juga digunakan untuk mempersilahkan dengan sopan arus modal masuk dan membawa kerusakan sosial-ekologis di kampung. Masih ingat Got yang saya ceritakan di catatan sebelumnya- yang pembangunannya mengorbankan lahan gambut-? Got yang konon adalah perlambang konektivitas demi kelancaran arus modal, ternyata memiliki peranan lain yang lebih menyakitkan dan sungguh biadab. Berat hati saya sampaikan, bahkan ketika menulis ini- saya harus tercekot menahan tangis- Got tersebut ternyata juga difungsikan sebagai sebagai tempat mengalirkan limbah aktivitas perkebunan sawit. Saya *shock* ketika pertama kali menyaksikan pemandangan yang semakin jelas ketika terjadi *air tohor* (air surut). Jika sebelumnya saya bersama Juang dan Nis menyusuri got itu dalam keadaan air tidak setohor sekarang, maka fungsi got memang seperti jalan yang menghubungkan antara desa dan camp pekerja dan kantor perusahaan. Namun dalam beberapa minggu ini, air

menjadi semakin tohor sehingga posisi got menjadi lebih tinggi daripada badan sungai, sehingga terlihatlah tujuan lain dari pembangunan got itu sebenarnya.

Air tersebut, berbuih putih dan berwarna coklat. Sialnya got ini tidak berada jauh dari pemukimn warga terdekat- mungkin hanya sekitar 100-150 meter-. Warna dan bau yang muncul dari curahan air yang mengalir dari got ini mengingatkan saya kepada kerusakan ekologis di Puan Cepak, dimana air meski demikian dekat tapi sudah kehilangan fungsi faalnya. Warga juga mulai mengeluhkan hal ini melalui percakapan-percakapan sehari-hari, saya mendengarkan banyak keluh kesah yang telontar dari ibu-ibu bahkan anak-anak TPQ . Mereka mengaku khawatir akan kualitas air di masa mendatang, bahkan ibu semang saya sudah mulai memikirkan untuk membeli tangki besar penampungan air, yang ia bakal gunakan untuk menampung air dan kemudian dimasukkan obat kedalamnya-padahal ibu selama ini tidak pernah mengkonsumsi air yang sudah dibumbui oleh obat air tersebut. Mereka juga mengecam kenapa got tersebut malah sekarang tidak bisa dilalui ces, dan mempertanyakan fungsi pembuatannya. Menurut Om Lim tujuan lain lagi dari pembangunan got ini adalah untuk mengeringkan daratan (yang sudah pasti lagi-lagi gambut) sehingga bisa dilakukan aktivitas tanam di sana. Ah, dalam hal ini perusahaan menang banyak sekali. Pernah sesekali ketika kekesalan saya sudah tak tertahankan, saya sampaikan kepada Om Lim *'Om, itu got gimana. Itu dekat sekali dengan pemukiman warga. Kalau memang mau buat limbah, ya jauh dikit dong dari pemukiman'*. Lalu jawaban yang cukup mengejutkan pun mengalir *'Kalau itu lak, memak ndik dapat nyalahkan perusahaan. Kamu tahu yang salah siapa: Pemerintah desa. Mereka yang memang mau dibangun disana, padahal dari awal aku sudah sarankan untuk dibangun jauh deket sungai sekelambu san , tapi ndik ada yang mau dengar saran aku. Ya seperti itu lah jadinya'*. Saya cukup heran kenapa pemerintah desa tidak memperhitungkan niat lain pembangunan got yang awalnya untuk mendukung infrastruktur kebun plasma nantinya, menjadi (sekalian) tempat pembuangan limba aktivitas perkebunan. Apakah benar-benar murni ketidaktahuan atau sebaliknya. Berat, tahun ini benar-benar tahun terberat sekaligus paling tragis bagi Kampung ini. Pihak pemerintah desa, sudah demikian tunduk pada setiap rencana mengubah bentang ekologis, hari ini gambut diubah jadi perkebunan sawit- gambut diubah got- gambut dikonservasi- besok apa kabar gambut? Haruskah ia direbut dan dicerabut demi semua proses mengakumulasi modal dan melipatgandakan keuntungan?

Di lain hari ada sebuah cerita yang lebih tragis menghampiri. Perusahaan sawit membuka lowongan 'upah borongan' kepada warga kampung bagi siapapun yang tertarik. Jenis pekerjaannya adalah memindahkan anak pohon sawit -dengan tinggi kira-kira 80-100 Centimeter yang terletak dalam sebuah polibek berisi tanah yang diperkirakan memiliki berat lebih dari 5 kilogram - ke lobang penanaman. Untuk setiap satu polibek, buruh borongan akan diberi upah sebesar 2000 rupiah, bisakah beri tahu saya kosakata lain untuk menggambarkan lowongan kerja seperti ini, selain gila dan kejam? 2000 rupiah bahkan untuk membeli mie instan saja sudah tidak laku lagi. Begitu berani pihak perusahaan memanfaatkan kondisi paceklik di kampung, sehingga seolah-olah tidak mengambil upah tersebut adalah pilihan paling masuk akal untuk saat ini. Begitu geram saya mendengarnya, begitupula dengan warga kampung. Mereka menganggap upah tersebut keterlaluan rendahnya dan tidak manusiawi. Pada awalnya ada beberapa ibu-ibu yang mau menerima borongan tersebut, tapi setelah mendengar nilai upah yang demikian rendahnya mereka

berfikir ulang atas kemungkinan resiko yang akan mereka terima ‘*Di Sabintulung itu kalau gak salah 3800 rupiah perpolibek lak, itu dulu. Masak ini 2000 rupiah, belum lagi itu polibek berat betul dan tanah nya gambut lagi yang kalau diinjak, bisa sampai setengah tungkai kaki jeblok nya. Jangankan orang bini (perempuan) , orang laki aja mungkin ndik tapi sanggup*’ Keluh Ibu San yang pada awalnya semat berminat.

Sampai detik ini, harus tetap saya katakan bahwa banjir belum lagi tiba. Uang segar masih sukar didapatkan, bapak semang saya kembali harus berlayar hingga ke Muara Ancalong. Pekerjaan ini mungkin bisa dibilang diluar batas peri kemanusiaan, karena upah yang terlampau murah dan juga resiko kecelakaan kerja yang juga mengintai setiap saat, namun bagaimanapun dengan lambat dan minimnya proses pertukaran barang dan jasa di kampung – yang berpengaruh atas krisis uang segar- pekerjaan ini nampaknya akan mendapatkan pertimbangan sendiri di orang-orang tertentu. Sebab beberapa hari lalu, sebuah berita sampai lagi ditelinga saya bahwa ada salah satu warga kampung Mangkuliding yang berniat untuk mengambil upah borongan tersebut. Sungguh perlahan-lahan kampung disuplai opium agar terus candu terhadap ekonomi sawit.

Pengurus Bukan Pemerintah dan Hal-Hal Besar Yang Tidak Pernah Dipersoalkan

Pada pertengahan bulan agustus, dua boat yang ditumpangi oleh pegawai dari dinas perikanan, dinas kehutanan dan beberapa personil kepolisian melakukan razia terhadap aktivitas penangkapan ikan dengan alat-alat destruktif seperti setruman dan meracun, lalu tidak lupa mereka memperingatkan – mungkin lebih tepatnya meneror- siapapun yang ketangkap tangan sedang *behuma* dengan cara membakar lahan. Kabar ini simpang siur saya dengar, sebab rombongan pemerintah ini tidak sampai ke Kampung Mangkuliding apalagi Desa Liang Buaya, konon mereka hanya sampai di Kampung Nangka Bonah (Desa Tunjungan), sebab terjadi perlawanan oleh warga kampung tersebut, sehingga boat tidak bisa melanjutkan perjalann. Meski pun simpang siur, kabar tersebut tetap bisa sampai ke kampung Mangkuliding, bisa demikian karena ada seorang warga Mangkuliding yang tertangkap sedang melakukan aktivitas penyetruman saat rombongan ini sedang melintas berpatroli.

“*Muj (nama orang) ditangkap sama orang dinas perikanan, ndik papa dah rasain, biar ndik nyetrum terus. Dia itu ndik tapi tahu air dalam atau air tohor, kerjanya nyetrum haja. Dah dikasih tahu orang sini, tapi terus haja*”.⁴ Begitu Ibu Ju memberi tahuku. Awalnya ketika kabar ini belum masuk ke kampung, kabar yang justru dia terima tidak demikian adanya melainkan seperti ini ‘*Sidmu lak, di tegor polisi gara-gara bakar lahan pas lagi Behuma. Hampir dialak polisi ke Muara Kaman, tapi sida ndik melawan dah. Kenapa dimarahi ya lak? Padahal kan kami bakar ndik tapi banyak, kami ndik bakar hutan, Cuma bakar tanaman duri maha*’.⁵

Kabar awal yang sampai di kampung adalah bahwa ada polisi kehutanan yang menegor rombongan warga yang sedang membuka lahan untuk *behuma* dengan cara membakar tanaman-tanaman duri. Tapi berita berkembang dengan cepat, dalam satu jam

⁴ Muji, ditangkap sama dinas perikanan, tidak apa-apa biar rasain, biar tidak nyetrum terus. Dia itu tidak peduli mau air dalam atau air lagi surut, kerjanya nyetrum saja. Sudah dikasih tahu orang sini, tapi terus saja.

⁵ Rombonga Muslih (Merujuk kepada keluarga) di tegur polisi gara-gara membakar hutan ketika lagi berladang. Hampir dibaw ake kantor polisi Muara Kaman, tapi mereka tidak melawan. Kenapa dimarahi ya lak? Padahal kan kami bakar tidak banyak, kami juga tidak bakar hutan, Cuma bakar tanaman duri.

berikutnya ternyata informasi yang masuk berbeda lagi yakni mengenai penyitaan alat setrum. Ketika berita tentang pembakaran hutan yang didengar ibu Ju, beliau memperlihatkan ekspresi marah lewat pernyataan diatas, bahwa beliau tidak terima kenapa aktivitas behuma justru dikait-kaitkan dengan insiden kebakaran hutan. Beliau menyatakan bahwa yang sebenarnya dibakar bukan hutan, melainkan tanaan duri. Ya, yang dimaksud dengan tanaman duri adalah gulma yang tumbuh di seluruh daratan. Gulma ini memang memiliki duri tajam dan tingginya bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Hanya ada dua cara menghilangkan gulma ini, yakni dengan menebasnya dengan arit dan yang kedua adalah dengan membakarnya. Ibu-ibu secara acak menggunakan kedua cara diatas, ketika mereka merasa cukup *fit* untuk ‘ngarit’, maka mereka akan lebih memilih ‘ngarit’ ketimbang ‘membakar’. Kalaupun membakar, mereka biasa tidak menjamah wilayah yang terlalu luas, mengingat harga bensin yang merangkak naik- tentu saja membakar lahan membutuhkan banyak bensin toh. Tapi hari ini ketika wacana membakar lahan dilabeli sebagai aktivitas ilegal nan melanggar hukum, ragam ketakutan menyusup ke hati ibu-ibu – sebagai kelompok yang sekarang sedang aktif-aktifnya *behuma* ketimbang kelompok lain. Ibu Ju sendiri sudah mulai takut untuk membakar lahan, sementara ia tidak terlalu kuat lagi untuk mengarit tanaman berduri tersebut, terpaksa ia harus ‘mengupah’ orang untuk membersihkan calon lahan behumanya. Untuk mengupah orang, ibu harus merogoh kantong 50 ribu. Maka wajar ia menampilkan ekspresi ketidak setujuan ketika informasi mengenai peneguran terjadi di kampung.

Nah berita yang masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya tersebut, tiba-tiba sudah berganti wajah saja menjadi berita menyoal penyitaan alat setrum. Terjadi perubahan ekspresi yang cukup drastis oleh ibu, dari penolakan menjadi persetujuan yang sangat, saat mendengar.

Peluang Pengorganisasian dan Pemulihan Krisis

Liang Buaya dengan luasan administratif mencapai 9000 hektar (tidak termasuk didalamnya wilayah-wilayah yang masih disengketakan⁶) dan bentang alam yang didominasi oleh perairan adalah tantangan yang berat untuk seorang yang mengemban misi ‘pengorganisasian’. Adalah saya yang bercita sedemikian mulia yakni membuka jalan bagi kepemimpinan perempuan untuk membantu proses pemulihan krisis. Saya yang tidak bisa dibilang berpengalaman apalagi terlatih dengan moda *live in* dan etnografi feminis menemui rupa-rupa kesulitan dari tataran ideologis hingga taktis. Mendapati kultur yang meminggirkan perempuan dalam setiap pranata sosial tentu saja mengendurkan visi yang dari awal sudah dicitakan. Belum lagi kenyataan bahwa informasi dan pengetahuan soal pengkaplingan ruang hidup hanya berpusar di kalangan mereka yang memegang tongkat kekuasaan yang pula berjenis kelamin laki-laki, maka mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan mendekati garis tak mungkin.

Kurang lebih tujuh bulan saya tinggal di Mangkuliding, sebuah kampung yang secara sosiologis semi-terikat dengan desa liang buaya. Setiap orang di kampung ini menolak untuk disebut sebagai orang ‘liang buaya’, menurut mereka, mereka adalah orang mangkuliding (meski secara adminsitratif masuk ke skup pemerintahan desa liang buaya.). Hal ini tentu saja

⁶ Lihat catatan tentang konflik tapal batas dengan sedulang dan isu pemangkasan wilayah

mengacu kepada sejarah perkembangan rumah mandaan yang dahulu berkoloni membentuk perkampungan. Saat ini Liang Buaya sendiri memiliki tiga kampung mandaan: Oridan, mangkuliding dan Liang Buaya. Namun setelah terjadi pemekaran, kampung ini dibagi menjadi dua dusun yakni Tunas mekar dan Bina Harapan⁷ (nama mangkuliding dan oridan tetap dipertahankan untuk merujuk kepada perkampungan – bukan dusun). Warga Mangkuliding menolak disamakan status kesejarahannya dengan warga liang buaya. Hal ini dalam kehidupan sehari-hari saya amati, ketika misal saya tidak sengaja menyebutkan bahwa mereka adalah orang liang buaya, maka mereka langsung meralat ucapan saya dengan berkata '*kami ini orang mangkuliding kak ela*'.

Bentukan pola kelindan relasi sosial nya pun berbeda satu sama lain, Oridan sebagai kampung yang hanya menyisakan 4 mandaan dan 2 penghuni aktif tentu sangat berbeda dengan Liang Buaya yang berpenghuni hampir 800 an jiwa. Mangkuliding yang didominasi oleh suku kutai dengan kedekatan garis keturunan satu sama lain tentu berbeda dengan Liang Buaya yang porsi 'suku pendatang' nya lebih dominan. Artinya ketika kita merujuk kepada kesatuan masyarakat, entah itu desa/kampung/dusun, terlebih dahulu kita pastikan bahwa dalam satu entitas kecil sekalipun, tetap ada perbedaan-perbedaan sosiologis yang menyebarkan. Kenapa hal ini penting saya ingatkan berkali kali dalam setiap catatan, yakni untuk memperingatkan diri saya sendiri dan tentu saja setiap orang yang terlibat dalam proses belajar saya di kampung ini, bahwa yang dimaksud dengan situs haruslah diperjelas mengacu kepada situs sosial-ekologi atau situs adminstratif. Saya merasa kelimpungan dan lelah harus membagi diri antara liang buaya dan mangkuliding (bahkan oridan saya abaikan sama sekali, mengingat jarak yang cukup jauh dan tidak ada moda transportasi umum yang siap antar jemput saya kapanpun). Bukan perkara mudah, untuk menyelami kebudayaan suatu entitas, saya memutuskan untuk lama di mangkuliding bukan tanpa pertimbangan, melainkan pilihan bahwa saya ingin benar-benar merasakan kultur kehidupan sungai dengan mandaan sebagai ciri utama yang saat ini tersisa. Selain itu pertimbangan bahwa ketergantungan terhadap kontak utama yakni Om Lim, bahwa mau tak mau harus diakui bahwa ia yang membuat orang-orang sedikit memberi peluang bagi saya untuk menggali informasi a, b dan c. Rumit untuk melepaskan bayang-bayang beliau sebagai 'tokoh desa' atas proses belajar saya di kampung dan jangan tanya apakah yang demikian ini membantu atau malah sebaliknya.

Selama di mangkuliding saya mendapati bahwa potensi pengorganisasian bisa dimulai dari sini, ruang sosial-formal perempuan tidak pernah dihidupkan lagi. Kelembagaan perempuan dalam langgam kehidupan sehari-hari menyisakan *mencok'an* dan *behuma*, yang terkadang amat rumit untuk diarahkan kepada pembicaraan yang teratur. Dalam *behuma* misalnya, ibu-ibu akan fokus beraktivitas di kapling lahan masing-masing, yang secara jarak tidak memungkinkan mereka bercakap. Dulu ada kelembagaan formal yakni pengajian rutin yang juga merupakan bagian dari program PKK desa yang tersentralisasi di liang buaya '*Dulu, masih sering sida bu deni tu pengajiaan disini lak*' – Ungkap salah satu ibu. Namun entah dengan alasan apa, pengajian di Mangkuliding tidak lagi aktif sementara di Liang Buaya masih berlanjut hingga sekarang.

⁷ Bandingkan betapa tidak adanya ikatan sosiologis pemberian nama dusun setelah terjadi pemekaran desa, Tunas mekar? Bina Harapan? Nama macam apa yang disematkan kepada desa yang begitu kental akar sejarah kehidupan sungainya.

Saya memutuskan untuk membuka pintu masuk lewat cerita pengajian ibu-ibu. Pada tanggal 12 Oktober saya mengundang mereka untuk hadir. Pertemuan pertama dilakukan pada hari jum'at dan pada saat itu seluruh ibu dari hulu ke hilir kampung hadir. Saya sungguh mengira tidak ada satupun dari mereka yang akan datang memenuhi undangan sementara waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 WITA, meski ketika *beundangan*⁸ saya sudah jelaskan bahwa acara akan dimulai pada pukul dua siang. Saya sudah patah semangat dan hanya tertidur-tidur lemas di gedung pusban itu. 20 Menit kemudian satu persatu dari mereka datang dengan membawa anak-anak, saya kembali menemukan semangat. Saya tahu mereka butuh perjuangan untuk datang, melawan waktu senggang dan juga moda transportasi yang tidak biasa. Saya sangat terharu.

Kami meminjam gedung pusban (puskesmas pembantu), sebuah gedung kecil seukuran 5x5 meter, pengap dengan jendela yang tidak bisa lagi dibuka-tutup secara sempurna, mengingat memang tidak banyak pilihan tempat pertemuan di kampung sungai seperti ini, maka gedung ini adalah pilihan pertama dan terakhir. Membaca surat yasin adalah aktivitas utama yang menjadi cover dari pertemuan, bagian ini memang saya kuasai dengan baik. Pendidikan qur'ani yang saya tempuh dari SD hingga Kuliah sangatlah membantu, sehingga tidak ada kesulitan untuk itu. Ibu-ibu pun tampak senang melihat saya bisa membaca kitab suci dengan baik dan irama-irama yang cukup enak didengar (untuk tidak menyebut merdu). Kemampuan seperti ini sangat membantu ketika dilapangan, pendekatan religiusitas adalah pintu masuk yang tepat untuk konteks kampung ini.

Di akhir pertemuan, saya berencana untuk memutar film 'samin vs semen' yang memotret perjuangan ibu-ibu di pegunungan kendeng dalam pabrik semen, dengan harapan mereka bisa mendapatkan potret perjuangan perempuan dalam menghadapi gempuran krisis sosial-ekologis. Karena mengandalkan mesin genset, kendala teknis pun muncul ditengah-tengah rencana. Mesin genset hanya mampu 'menarik' satu alat elektronik saja. Sedang saya harus menyuplai aliran listrik ke tiga buah alat elektronik yakni : Proyektor, Laptop (karena batere habis) dan Kipas angin. Dari ketiga alat ini semuanya bernilai penting, jangan bayangkan kipas angin hanya *additional stuff* saja, justru alat ini yang menentukan jalan tidaknya acara. Ibu-ibu yang datang kebanyakan membawa anak kecil yang berusia batita hingga balita, sehingga mereka membutuhkan banyak udara untuk bernafas. Saya memang memutuskan untuk mencabut kipas dan laptop dengan hanya menyisakan proyektor saja, konsekuensinya saya harus 'mempercepat' banyak adegan dalam film dan menggantinya dengan penjelasan lisan. Ditengah-tengah penjelasan, setengah dari jumlah ibu-ibu meninggalkan ruang pertemuan, hati saya menciut, tidak mudah memang mempertahankan konsentrasi, apalagi sajian visual yang saya perlihatkan bukanlah sebuah sajian yang lazim mereka nikmati. Tapi saya tetap mempertahankan penjelasan hingga akhir. Ketika sesi komentar dan tanya jawab, tentu saja tidak ada dari mereka yang memberikan respon sama sekali, namun saya sempat merekam mimik wajah ketika melihat beberapa adegan, semisal ketika ada ibu pejuang kendeng yang ditampar oleh preman, terlihat mereka meringis dan mengernyitkan dahi, sebuah ekspresi ketidaksetujuan yang mendalam. 'Umpatan-umpatan'

⁸ Beundangan adalah tradisi masyarakat kutai yakni mengundang tetangga dan handai taulan secara lisan untuk hadir dalam sebuah acara, seperti pernikahan, syukuran, tazmiyahan, dll. Tradisi tersebut hidup hingga hari ini dalam setiap perhelatan acara. Saya pun tidak pernah menemukan undangan pernikahan diberikan secara tertulis selama tinggal di sini.

juga terlontar dan mengiringi ekspresi empati dan marah tersebut. Lalu ekspresi sedih (beberapa memegang dagu sambil menggeleng-gelengkan kepala) ketika melihat pembubaran paksa demonstrasi ibu-ibu kendeng.

Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, saya coba melakukan diskusi dengan tema isu seputar kondisi kampung. Tapi saya hampir putus asa dan merasa tidak punya kemampuan memfasilitasi kelompok belajar dengan tujuan akhir mendorong tumbuh kembangnya pemimpin perempuan dalam menjawab krisis sosial-ekologi. Saya kesulitan mengubah moda komunikasi dari informal ke formal dan saya juga merasakan ada atmosfer pertemuan yang berubah ketika saya sudah mengalihkan alur pembicaraan. Biasanya para ibu akan cenderung diam dan tidak menanggapi obrolan saya sama sekali. Meski saya sudah berupaya menggunakan bahasa lokal, tetap saya merasa belum mengenal ‘bagaimana mereka menamai krisis sosial-ekologi’ sesungguhnya. Benarkah apa yang saya KOAR-KOARKAN sebagai krisis di catatan ke satu hingga ke sepuluh ini justru benar mereka arti dan artikulasikan sebagai krisis. Kenapa saya seperti orang luar (meski saya sudah hampir 9 bulan hidup dan menyelami seutuhnya langgam kehidupan sehari-hari mereka, mempelajari bahasa-kebudayaan-hingga kebiasaan) yang memaksakan pengetahuan akademik bahwa ‘Hey bu ini krisis sadarkah?’.

Jujur banyak hal yang membuat saya tidak bisa melakukan ‘agenda fasilitasi’ dengan baik. Melakukan *fotovoices* saja, tidak semudah dan seenteng yang difikirkan. Beberapa kali saya coba, tapi ada saja kendala untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Ibu-Ibu adalah lapisan kelas yang khas dan memiliki karakteristik sendiri. Tidak bisa saya menggunakan kacamata kuda dengan menyatakan bahwa ‘Mereka korban krisis sosial-ekologi, mereka korban patriarki, mereka dijauhkan dari pusat kekuasaan’ dan hal-hal lain yang pada intinya ingin menyatakan bahwa mereka tersudut. Semisal, iya beberapa ibu sadar bahwa mereka adalah korban ekspansi kelapa sawit, tapi dapur mereka tetap harus ‘ngepul’, maka bekerja atau mendorong suami mereka kerja di perkebunan adalah sebuah keniscayaan. Lantas untuk kasus seperti ini, mungkinkah mereka masih bisa bicara soal krisis sosial-ekologi? Saya sedang banyak berkaca dan merefleksikan pelajar macam apa saya ini. Peneliti yang berpihak kah saya? seberapa jauh saya pantas menyandang gelar Etnografer Feminis dan Fasilitator lingkaran belajar perempuan? Mampukah saya membuat mereka bicara untuk menyatakan tidak setuju akan kebijakan desa? Berbicara dalam sebuah forum? Saya memang gagal seutuhnya. Gagal berpihak, gagal menjadikan semua proses belajar ini bermanfaat bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur saya anggap IBU KANDUNG saya, IBU BUMI saya, IBU PERTIWI saya. Bahkan pada detik ini, ketika saya menulis ini, saya harus menghapus airmata kekecewaan saya sendiri. Saya sedang mendamba perjuangan ‘organik’ yang saya susah jelaskan kepada siapapun apa dan bagaimana maksudnya. Saat saya kembali mengulas perjuangan Gunarti, Eva Bande, Nyai nissa, Aleta baun atau ibu-ibu lain dipelosok manapun, saya merasa saya tidak seperti mereka yang tulus dan berjuang demi PANGGILAN TANAH AIR, saya hanya memaksakan benak dan kehendak saya. Bersyukur jika catatan saya dibaca tidak hanya oleh mentor, tapi oleh tim pendukung maupun pihak donor. Saya tidak tahu apakah demikian tidak penting nya cerita kali ini, tapi saya harus akui, saya sedang berada pada titik nadir dari rangkaian proses belajar ini.